BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Menurut *World Population Date Sheet* tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat kelima dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu sekitar 249 juta jiwa.[1] Pada sensus yang telah dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan dengan bimbingan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 menunjukan jumlah penduduk di Indonesia sebesar 258.704.986 jiwa, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 262,594,708 jiwa. [2]

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah kependudukan tersebut adalah melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, pada prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2015-2019 juga disebutkan bahwa yang menjadi prioritasnya adalah mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang.[3]

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa program keluarga berencana (KB) adalah salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi dengan harapan dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun.[2]

Program KB di Indonesia sudah diakui secara nasional maupun internasional dalam rangka menurunkan angka *fertality rate*, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa masalah penting. Salah satu masalah tersebut adalah masih tingginya angka kejadian *unmet need* KB.[2] *Unmet need* KB adalah kebutuhan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi pada pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak ber-KB. [2] Menurut SDKI tahun 2012 menjelaskan bahwa *unmet need* adalah kelompok pasangan usia subur yang tidak ingin memiliki anak ataupun mereka ingin menunda untuk memiliki anak berikutnya, yang masih aktif secara seksual tetapi mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi, dikarenakan belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya.[5]

Mengurangi angka *unmet need* untuk keluarga berencana telah menjadi tujuan utama dalam berbagai kebijakan, program, dan penelitian kesehatan reproduksi selama beberapa dekade. Tingginya angka *unmet need* ini merupakan

salah satu penyebab tidak tercapainya targer TFR pada tahun 2014 yaitu menjadi 2,1%.[2]

Tingginya angka *unmet need* KB sangat berpengaruh pada rapatnya jarak kelahiran anatar anak dan banyaknya anak yang dilahirkan oleh satu orang perempuan sehingga berisiko tinggi terhadap kematian ibu dan bayi. Kehamilan yang tidak diinginkan juga memicu terjadinya aborsi yang juga meningkatkan risiko kematian pada ibu. [6]

Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia, angka kebutuhan akan KB yang belum terpenuhi (*unmet need*) di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2007-2012, yaitu dari 13% menjadi 11%, namun pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi 12,70%, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 12,77%, hal ini menunjukan bahwa Indonesia tidak mampu mencapai target yaitu menjadi 10,48%. Persentase PUS yang merupakan kelompok *unmet need* KB di Indonesia tersebut, terdiri dari 6,22% yang beralasan ingin menunda memiliki anak, dan sebanyak 6,55% beralasan tidak ingin memiliki anak lagi. Angka *unmet need* KB tertinggi terdapat di provinsi Papua yaitu sebesar 31,09%, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebesar 20,16%, dan salanjutnya pada posisi ketiga ditempati oleh provinsi Sumatera Barat sebesar 18,54% . [2]

Pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat terjadi peningkatan proporsi *unmet need* KB dari sebesar 11,66% pada tahun 2013 menjadi 12,64%, dan pada tahun 2016 kembali terjadi peningkatan menjadi 18,54%. Kabupaten Tanah datar merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat yang terus mengalami peningkatan kejadian *unmet need* KB, dimana pada tahun 2014

angka *unmet need* KB nya sebesar 7,09%, dan kemudian terjadi peningkatan menjadi 11,15% pada tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2014 Tanah datar memiliki proporsi *unmet need* KB paling rendah diantara kabupaten kota yang ada di provinsi Sumatera Barat, namun pada tahun 2017 berada pada posisi kedelapan tertinggi kejadian *unmet need* KB. Salah satu dampak yang diakibatkan oleh kejadian *unmet need* KB di kabupaten Tanah Datar adalah tidak tercapainya target TFR yang telah ditetapkan oleh nasional yaitu 2,1. TFR di Tanah Datar pada tahun 2017 yaitu 2,50.[7]

Kabupaten Tanah Datar memiliki empat belas kecamatan, diantara empat belas kecamatan tersebut kecamatan Limokaum merupakan salah satu kecamatan yang memiliki proporsi *unmet need* KB yang tinggi. Pada tahun 2015 proporsi *unmet need* KB kecamatan Limokaum berada pada posisi kedua dengan persentase 12,6%, namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi 13,5%, hal ini menjadikan kecamatan Limokaum menempati urutan pertama dengan kejadian *unmet need* KB terbanyak di kabupaten Tanah Datar [8]

Berdasarkan hasil SDKI tahun 2012, alasan PUS yang tidak menggunakan KB diantaranya adalah karena perasaan yang tidak nyaman, terbatasnya akses, takut akan efek samping, kurangnya pengetahuan, dilarang oleh suami ataupun oleh keluarga, masalah kepercayaan serta ingin memiliki anak lagi.[9] Sedangkan dalam teori yang disampaikan oleh Bertrand pada tahun 1980 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pemakaian kontrasepsi ada tiga, yaitu faktor sosio demografi, faktor sosio psikologis dan faktor pelayanan kesehatan.[10]

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Mutiara Rachmawati Suseno di kota Kediri pada tahun 2011, didapatkan bahwa faktor yang berpengaruh secara

signifikan terhadap *unmet need* KB adalah pendidikan, pendapatan, status penggunaan kontrasepsi, pengetahuan wanita terhadap kontrasepsi, persetujuan suami, diskusi pasangan mengenai KB, dan kualitas pelayanan KB.[11] Selanjutnya, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul Hudha Fadhila dan teman-teman pada tahun 2015 di kota Padang, bahwa terdapat hubungan antara dukungan suami dengan kejadian *unmet need* KB. Sedangkan Pendidikan, pekerjaan, jumlah anak hidup, pengetahuan dan sikap responden tentang KB tidak terdapat hubungan yang bermakna dengan *unmet need* KB.[12] Ditambah lagi dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yellyta Ulsafitri dan Raisa Nabilla pada tahun 2015 di Bukittinggi diperoleh hasil bahwa pengetahun dan dukungan suami memiliki hubungan dengan kejadian *unmet need* KB.[13]

Dari fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya *unmet need* KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang maka dapat dirumuskan satu masalah yaitu: “faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan terjadinya *unmet need* KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar tahun 2019”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis "faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan teradinya *unmet need* KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019.".

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menganalisis distribusi frekuensi responden *Unmet Need* KB di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar tahun 2019
2. Mengetahui dan menganalisis distribusi frekuensi responden berdasarkan jumlah anak di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar tahun 2019
3. Mengetahui dan menganalisis distribusi frekuensi responden berdasarkan pengetahuan tentang KB di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar tahun 2019
4. Mengetahui dan menganalisis distribusi frekuensi responden berdasarkan sikap responden tentang KB di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar tahun 2019
5. Mengetahui dan menganalisis distribusi frekuensi responden berdasarkan Dukungan suami di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar tahun 2019
6. Mengetahui dan menganalisis distribusi frekuensi responden berdasarkan peran tenaga kesehatan di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar tahun 2019

7. Mengetahui dan menganalisis distribusi frekuensi responden berdasarkan ketersediaan alat kontrasepsi di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar tahun 2019
8. Mengetahui dan menganalisis hubungan jumlah anak responden dengan kejadian *Unmet Need* KB di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019
9. Mengetahui dan menganalisis hubungan pengetahuan responden dengan kejadian *Unmet Need* KB di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019
10. Mengetahui dan menganalisis hubungan sikap responden dengan kejadian *Unmet Need* KB di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019
11. Mengetahui dan menganalisis hubungan dukungan suami responden dengan kejadian *Unmet Need* KB di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019
12. Mengetahui dan menganalisis hubungan peran tenaga kesehatan dengan kejadian *Unmet Need* KB di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019
13. Mengetahui dan menganalisis hubungan ketersediaan alat kontrasepsi dengan kejadian *Unmet Need* KB di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019
14. Mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan kejadian *Unmet Need* KB pada responden di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar tahun 2019

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi mengenai *Unmet Need* KB

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

   Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan keterampilan penelitian dalam melaksanakan penelitian, serta diharapkan penelitian ini dapat digunkan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian *Unmet Need* KB.

2. Bagi Institusi Pendidikan

   Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai informasi, serta dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar dengan judul “Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian *Unmet Need* KB Pada Pasangan Usian Subur (PUS) di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar” yang dilaksanakan dari September 2018 sampai Februari 2019. Desain study yang digunakan adalah *Crossectional* dengan memeperoleh data melalui kuisioner yang diisi oleh responden.